

## ABSTRAK

Nama : Achmad Rifqi Aminullah  
Prodi : Ilmu Pemerintahan / Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Judul : Upaya Pemerintah Kabupaten Jember Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Puger

Seperti yang diketahui bahwasanya Upaya Pemerintah kabupaten jember Terhadap kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Puger. Dimana masyarakat pesisir adalah sekelompok orang atau komunitas yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir, namun seringkali nelayan di pandang sebelah mata oleh sebagian besar masyarakat yang identik dengan kamiskinan. Angapan ini patut di renungkan bersama, mengingat bahwa struktur usaha perikanan sejauh ini memang masih didominasi oleh usaha skala kecil. Kawasan perikanan puger merupakan salah satu kawasan perikanan yang di arahkan untuk di kembangkan sebagai kawasan minapolitan perikanan tangkapn di Provinsi Jawa Timur. Namun sampai saat ini masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan perkembangan kawasan minapolitan belum optimal.

Penelitian ini, menggunakan metode penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif yakni penelitian yang berisi tentang gambaran secara mendalam, tentang apa yang menjadi pokok permasalahan yang di teliti oleh peneliti. Adapun lokasi penelitian ini adalah masyarakat nelayan yang ada di kecamatan puger yang mana para nelayan tersebut di bentuk KUB yakni kelompok usaha bersama yang di bentuk oleh masyarakat itu sendiri di kecamatan puger, adapun kegiatan di dalam KUB tersebut adalah para nelayan dalam melakukan penangkapan ikan secara bersama. Untuk penentuan informan penaliti menggunakan metode snowball yakni dengan 3 orang di antaranya adalah ketua KUB dimana ketiga orang tersebut masing - masing ketua KUB.

Hasil penelitian ini telah menunjukkan peran serta pemerintah Kabupaten Jember ( Dinas Peternakan Perikanan dan kelautan ) yakni salah satunya melalui bantuan berupa dana hibah yang di berikan oleh dinas yang bersangkutan secara langsung kepada masing-masing KUB dalam rangka memenuhi kelengkapan peralatan nelayan saat melaut dan hal ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat nelayan di kecamatan puger.

Kata kunci : Masyarakat Nelayan

## **ABSTRACT**

*Name* : Achmad Rifqi Aminullah  
*Study Program* : Science Administration/Faculty of social science and politics  
*Title* : Jember District Government Efforts Against The Welfare of Fishermen Society In Kecamatan Puger

*As it is known that Jember District Government Efforts Against the welfare of the Fishermen Community of Puger District. Where coastal communities are a group of people or communities living in coastal areas and the source of economic life depends directly on the utilization of marine and coastal resources, but fishermen are often overlooked by most communities that are identical to ours. It should be reflected together, given that the structure of fisheries business so far is still dominated by small-scale enterprises. Puger fishing area is one of the fishery areas that is directed to be developed as a minapolitan fishery area in East Java Province. But until now there are still some obstacles that cause the development of the minapolitan region has not been optimal.*

*This research, using the method of disciptive research with qualitative approach that is the research that contains about the depth in depth, about what is the subject of the problems in the research by the researchers. The location of this research is the fishermen community in the district of puger where the fishermen are in the form of a group of cooperatives KUB is formed by the community itself in the district puger, while the activities in the KUB is the fishermen in fishing together . For the determination of informant penaliti using snowball method that is with 3 people of whom is the chairman of KUB where the three people are each - each chairman KUB.*

*The results of this research have shown the role of government of Jember Regency (Fishery and Fishery Animal Husbandry Department) which is one of them through the grant aid given by the relevant agency directly to each KUB in order to fulfill the completeness of fishing equipments while going to sea and this Aims to prosper the fishing community in the district of puger.*

*Keywords: Fisherman Society*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Mayarakat pesisir pantai adalah kelompok orang atau komunitas yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir. Mereka terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudi daya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengola ikan, supliyer, factor sarana produksi perikanan. Dalam bidang non perikanan, masyarakat pesisir bisa terdiri dari penjual jasa tranfortasi dan lain—lain.

Namun seringkali nelayan dipandang oleh sebagian besar masyarakat sebagai salah satu kelompok masyarakat yang identik dengan kemiskinan. Anggapan ini patut di renungkan bersama, mengingat bahwa struktur usaha perikanan sejauh ini memang masih didominasi oleh usaha skala kecil. Sebagian besar nelayan yang tergolong miskin merupakan nelayan tradisional yang memiliki keterbatasan kapasitas penangkapan baik penguasaan teknologi, metode penangkapan, maupun permodalan. Masalah structural yang di hadapi nelayan makin di tambah dengan persoalan cultural seperti gaya hidup yang tidak produktif dan tidak efisien. Secara alami ada inetraksi yang sangat kuat antaraketersedian sumber daya ikan, jumlah, dan kapasitas nelayan serta ekonomi dari hasil usaha penangkapan.

Sebagian besar masyarakat pesisir pantai tergolong rakyat miskin hal ini disebabkan tidak adanya sumber modal dan akses teknologi yang seharusnya dapat diperoleh oleh mereka, akses terhadap pasar dan rendahnya partisipasi masyarakat untuk pengelolaan sumber daya alam. Salah satu penyebabnya adalah sumber daya alam yang di pandang terbatas serta sarana dan prasarana pembangunannya kurang optimal sedangkan kemiskinan merupakan permasalahan utama yang sampai saat ini masih belum bisa terselesaikan, banyak masyarakat terlantar, tidak mempunyai pekerjaan yang layak sehingga mereka

tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan dimana, kebutuhan pangan adalah merupakan unsur utama dalam kehidupan manusia yang apabila asupan makanan yang dimakan oleh mereka kurang baik otomatis kesehatannya akan terganggu seperti yang kita ketahui banyak balita atau anak yang mengalami gizi buruk dikarenakan orang tuanya tidak dapat memberikan asupan gizi yang baik.

Serta pola konsumsi masyarakat Indonesia rata-rata masih kekurangan protein tetapi kelebihan karbohidrat. Upaya untuk mencukupi kebutuhan protein sehari-hari dengan caramengonsumsi ikan sedangkan ikan merupakan sumber pangan yang relatif murah dibandingkan dengan sumber protein hewan lainnya. Oleh karena itu ikan mempunyai potensi yang sangat baik dalam upaya menanggulangi keadaan kekurangan gizi di daerah pesisir pantai.

Penelitian ini akan mencoba menyoroti tentang potensi daerah kecamatan puger dimana kecamatan puger merupakan daerah pesisir pantai yang cukup berpotensi keanekaragaman lautnya. Namun kurang mendapat perhatian dari pemerintah setempat maka untuk itu peneliti ingin sekali membantu masyarakat dalam mengembangkan serta mengelola potensi laut yang ada di kecamatan puger melalui program-program yang telah di sediakan oleh pemerintah

Kawasan perikanan puger merupakan salah satu kawasan perikanan yang di arahkan untuk di kembangkan sebagai kawasan minapolitan perikanan perikanan tangkap di provinsi jawa timur. Namun hingga sampai saat ini masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan perkembangan kawasan minapolitan belum optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui karakteristik kawasan minapolitan serta potensi dan masalah dalam pengembangannya. Metode analisa yang di gunakan dalam penelitian ini meliputi analisa deskriptif. Analisa evaluatif yang di bantu dengan metode analisa LO. Analisa potensi masalah dan analisa akar masalah akar tujuan serta analisa development yang merupakan pengembangan hasil dari analisa akar tujuan. Bila di lihat dari hasil penelitian Pemasalahan yang ada pada wilayah perencanaan adalah masih terdapat sarana dan prasarana yang kondisinya kurang baik. Keterbatasan jenis produk olahan. Lembaga yang ada belum berperan aktif baik lembaga permodalan maupun penyuluhan serta kuangnya informasi pasar.

Apabila merujuk dari permasalahan yang ada, hal tersebut dapat diatasi dengan pengembangan kegiatan minapolitan yang terbagi menjadi beberapa sub pengembangan yaitu system dan rantai poduksihulu. Hilir dan fasilitas penunjang serta penentuan mengenai lokasi sentra atau pusat pemngembangan yang nantinya akan menjadi pusat control pengembangan kawasan minapolitan agar lebih terkoordinir dan terintegrasi antara aspek satu dan lainnya

Adapun salah satu program pemerintah yang telah dilakukan saat ini salah satunya adalah pengembangan kawasan minapolitan. Minapolitan adalah kawasan yang di bangun/di kembangkan dengan konsep yang di titik beratkan pada kemajuan sector perikanan dengan mengedpankan prinsip efisiensi, kualitas, pecepatan dan berkesinambungan.

Tujuan pembangunan minapolitan adalah untuk :

- a. Menumbuhkan serta meningkatkan kemandirian ekonomi kecil dan sekala mikro
- b. Menambah kualitas ekonomi menengah ke atas untuk memiliki daya saing yang tinggi dalam pasa global.
- c. Menjadikan sector ekonomi kelautan dan perikanan sebagai penggerak ekonomi regional

Kawasan minapolis di bangun bedasarkan beberapa kriteria umum yang wajib di penuhi, antara lain :

1. Pemanfatan lahan untuk pengembangan potensi perikanan harus menggunakan potensi yang sesuai dengan peningkatan produksi, seta wajib menjaga kelestarian dan mencegah adanya kerusakan lingkungan yang ada.
2. Tidak boleh memanfaatkan kawasan atau wilayah yang telah di tetapkan oleh pemeintah sebagai kawasan yang di lindungi kelestraiannya.
3. Kegiatan peikan yang di lakukan dalam sekala besar diharapkan mampu menyerap dan memberdayakan banyak tenaga kerja dari lingkungan sekitarnya.

Ada kriteria khusus yang harus di perhatikan dalam membangun kawasan minapolitan, beberapa di antaranya :

1. Mempunyai geliat aktifitas ekonomi yang mamapu mengerakkan pertumbuhan peekonomian
2. Memiliki sector ekonomi unggulan yang akan mendukung pertumbuhan sector ekonomi lain dalam wilayahnya atau kawasan lain di sekitarnya
3. Memiliki ketekaitan dengan daerah penguna hasil produksi maupun daerah yang menjadi penghasil sarana pendukung produksi.
4. Mempunyai kemampuan memelihara dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak sana demi berlangsungnya kegiatan dalam waktu panjang dan kelestraian lingkungan.
5. Memiliki luas wilayah untuk budidaya sekitarnya 200Ha

## **1.2 Rumusan Masalah**

Seperti yang telah di jelaskan di latar belakang bahwasanya kecamatan puger kabupaten jember adalah salah satu penghasil sumber laut yang cukup berpotensi, tetapi masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah, minimnya sarana dan pasarana bagi para nelayan. Permasalahan yang tepat untuk diteliti adalah : “ Bagaimana Upaya Pemerintah Kabupaten Jember terhadap Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Kec. Puger ?

## **1.3 Batasan Penelitian**

Untuk menghindari adanya kesalahan pengertian maupun kesalahan penafsiran. Penulis akan membatasi penelitian ini hanya sebagai referensi untuk instansi yang bersangkutan demi meningkatkan penyerapan ketenaga kerjaan dan perekonimian

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah “ Untuk Mengetahui Bagaimana Upaya Pemerintah Kabupaten Jember terhadap Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Kec. Puger”

### **1.5 Manfaat Penelitian**

- a. Sebagai landasanpenambah pengetahuan dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa
- b. Sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar strata satu (S1)

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Penentuan Lokasi Penelitian**

Pusat Penelitian dalam Penelitian ini adalah Kabupaten Jember Kecamatan Puger dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Puger adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Jember yang memiliki potensi perikanan yang cukup bagus akan tetapi masih kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Jember dari segi pemenuhan sarana dan prasarana untuk perkembangan perikanan dalam rangka pemenuhan perekonomian masyarakat Kecamatan Puger. Salah satunya pengembangan Kawasan Menapolitan yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember namun tidak berjalan dengan efektif

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertitik tolak dari paradigma fenomenologis yang objektivitasnya di bangun atas rumusan tentang situasi tertentu sebagaimana yang di amati oleh individu atau kelompok sosial tertentu, dan relevan dengan tujuan dari penelitian itu. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah lebih berupaya memahami situasi tertentu.

#### **3.3 Penentuan Sumber Data (Informan)**

Informan ialah orang yang memberikan informasi, dan yang akan menjadi informan di dalam penelitian ini memiliki cirri – cirri sebagai berikut :  
([www.artikata.com/arti-330710-informan.html](http://www.artikata.com/arti-330710-informan.html))

1. Minimal berusia 18+



2. Orang yang tinggal di lingkungan TPI lebih dari 2 tahun
3. Pengepul ikan

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka mengumpulkan data atau informasi di lapangan, maka dalam penelitian digunakan teknik antara lain :

1. Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan- pertanyaan secara langsung kepada para informan. Model wawancara yang digunakan adalah model wawancara terbuka dan tertutup.
2. Metode Dokumentasi, yaitu suatu cara untuk mendapatkan data atau informasi berdasarkan catatan atas dokumen yang ada
3. Metode Observasi, yaitu cara untuk mendapatkan data atau informasi dengan melakukan pengamatan atas permasalahan yang diteliti dilapangan kemudian mencatatnya. Jenis obeservasi yang digunakan adalah observasi non partisipan.

### **3.5 Teknis Analisis Data / Informasi**

Setelah semua data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, kemudian disajikan dan dianalisa dengan cara deskriptif kualitatif, artinya data atau informasi yang terkumpul dari para informan digambarkan dengan kata- kata atau kalimat yang dipisah – pisahkan menurut kategori untuk memperoleh suatu kesimpulan penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

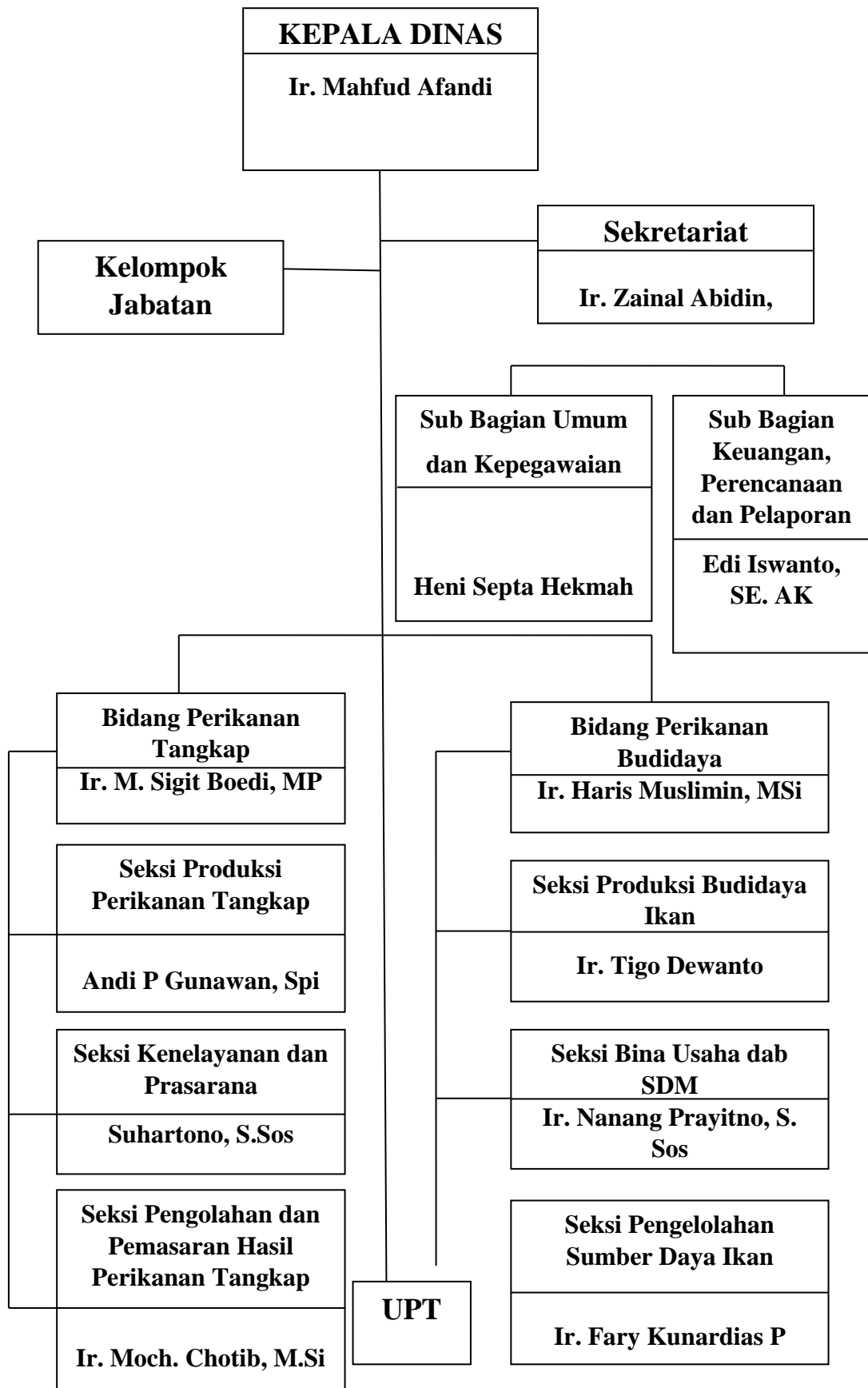
Adapun sebelum penyajian dalam Bab IV dikemukakan kondisi daerah yang menjadi pusat penelitian ini dipandang perlu untuk memberikan gambaran secara umum tempat berlangsungnya penelitian.

#### **4.1 Sejarah Singkat Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jember**

Dalam deskripsi lokasi penelitian ini akan disajikan gambaran umum dan sejarah singkat mengenai Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jember yang dimana terletak di Jl. Letjend Suparpto No. 139 Kelurahan kebonsari, kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa 68122. Pada tahun 1992, kelembagaan peternakan dan perikanan berdiri sendiri dengan nama Cabang Dinas Peternakan Kabupaten Jember dan Cabang Dinas Perikanan Kabupaten Jember. Pada tahun 1993 terjadi penyerahan sebagai urusan Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten Jember, dimana Cabang Dinas Peternakan dan Perikanan berubah menjadi dinas Peternakan Daerah Kabupaten Jember dan Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Jember. Pada era otonomi daerah tahun 2001, kedua lembaga ini masing – masing berubah lagi menjadi Dinas Peternakan Kabupaten Jember yang beralamat di Jl. Letjen Suprpto No. 139 serta Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jember yang beralamat di Jl. Letjen Panjaitan Jember. Pada tahun 2004 terjadi penyatuan dua SKDP dengan nama Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember. Selanjutnya pada tahun 2009 berubah nama menjadi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Jember yang beralamat di Jl. Letjen Suprpto No. 139, kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember berdasarkan Perda No 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember. Sebagai organisasi publik yang berkompeten terhadap peningkatan sarana dan prasarana . Untuk itu, dalam Sub Bab akan diuraikan mengenai peningkatan sarana dan prasarana, Sebagai sumber bahasan gambaran umum ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten

Jember Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jember.

#### 4.1.1 Struktur Organisasi



#### **4.1.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan**

Visi dan Misi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jember penyusunannya disesuaikan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 dan Peraturan daerah Nomor 15 tahun 2008.

#### **4.1.3 Visi :**

Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jember yang maju dan mandiri

#### **4.1.4 Misi :**

- a. Meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia dalam pengelolaan sumberdaya Peternakan, Perikanan dan Kelautan
- b. Mengembangkan produk – produk unggulan yang berdaya saing menghadapi pasar global

#### **4.1.5 Tujuan Pembangunan Dinas Peternakan dan Perikanan**

##### **1. Tujuan Umum :**

- a. Meningkatkan Kualitas Kebijakan dan Program serta memperbaiki sarana dan Prasarana untuk meningkatkan kinerja aperatur
- b. Meningkatkan produktifitas dan produksi dengan menerapkan teknologi tepat guna yang mampu mencukupi gizi masyarakat dari protein hewani serta berwawasan lingkungan.
- c. Mengembangkan usaha peternakan, perikanan dan kelautan yang bwewawasan agribisnis
- d. Menumbuhkembangkan kelembagaan masyarakat perikanan dan kelautan yang mandiri dan teguh

##### **2. Tujuan Khusus :**

- a. Meningkatkan kinerja aparatur
- b. Meningkatkan pelayanan adminitrasi
- c. Meningkatkan disiplin aparatur
- d. Meningkatkan pelayanan adminitrasi perkantoran
- e. Meningkatkan sarana dan prasana aparatur
- f. Meningkatkan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- g. Meningkatkan kapasitas kinerja lembaga dan aparatur pemerintah
- h. Mengendalikan penyakit ternak dan ikan untuk mendapatkan produksi hasil peternakan dan kelautan
- i. Menumbuhkembangkan kelembagaan masyarakat peternakan perikanan dan kelautan
- j. Meningkatkan produksi dan produksifitas usaha peternakan, perikan dan kelautan
- k. Meningkatkan pendapatan peternakan, nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil peternakan dan perikanan
- l. Menjaga kelestarian sumber daya peternakan, perikan dan kelautan

#### **4.1.6 Sasaran Pembangunan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan**

Sasaran pembangunan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Jember periode 2011 – 2016 secara umum adalah tercapainya peningkatan produksi dan produktifitas Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan peningkatan pendapat dan kesejahteraan peternak, pembudidaya ikan dan nelayan serta pelestarian lingkungan hidup. Sasaran tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kapasitas aparatur.
- b. Meningkatnya pelayanan adminitrasi perkantoran.
- c. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur.
- d. Menignkatnya disiplin aparatur.
- e. Menignkatnya sisitem pelaporan capaian kinerja dan keuangana.
- f. Meningkatnya kapasitas kinerja lembaga dan aparatur pemerintah.
- g. Terkendalnya penyakit ternak dan ikan untuk mendapatkan produksi hasil peternakan dan perikanan yang berkualitas standart ASUH.

- h. Meningkatkan produksi daging, susu dan telur
- i. Meningkatkan produksi ikan dan kelestarian sumberdaya kelautan.
- j. Meningkatkan kemampuan peternak dalam penerapan teknologi peternakan.
- k. Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber laut.
- l. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana alam dan laut dan prakiraan iklim.
- m. Meningkatkan produksi hasil perikanan tangkap.
- n. Meningkatkan usaha peternakan masyarakat.
- o. Meningkatkan kapasitas sumberdaya masyarakat pesisir.

#### **4.1.7 Produk Layanan Pada Masyarakat**

- a. Sosialisasi dan penanggulangan penyakit hewan menular
- b. Sosialisasi produk hukum dan program – program bidang peternakan, perikanan dan kelautan.
- c. Bimbingan teknis kepada kelompok peternakan, nelayan dan pembudidaya ikan
- d. Pelayanan kesehatan hewan, inseminasi buatan dan rumah potong hewan
- e. Penyuluhan peternakan, perikanan dan kelautan
- f. Penerbitan ijin usaha peternakan, perikanan dan kelautan
- g. Penerbitan surat jalan untuk pengiriman ternak dan hasilnya
- h. Penyediaan benih ikan berkualitas
- i. Pelatihan budidaya dan pengelolaan hasil ternak ikan dan laut

#### **4.1.8 Program Kerja**

- 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2. Peningkatan Saran dan prasarana
- 3. Peningkatan disiplin operator
- 4. Peningkatan kapasitas sumberdaya operator
- 5. Peningkatan pengembangan system pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan

6. Peningkatan kapasitas kinerja lembaga dan aparatur pemerintahan
7. Peningkatan produksi hasil peternakan
8. Peningkatan penerapan teknologi peternakan
9. Pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan
10. Pengembangan perikanan tangkap
11. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan
12. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan
13. Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber laut
14. Perlindungan nelayan kecil
15. Pengembangan budidaya perikanan
16. Pengembangan system penyuluhan perikanan
17. Pengembangan SDM perikanan
18. Pengembangan SDM peternakan
19. Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
20. Peningkatan pengelolaan hasil produksi peternakan
21. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
22. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
23. Pembinaan lingkungan social

#### **4.1.9 Dasar Hukum**

Keberadaan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jember sebagai perangkat pemerintah Kabupaten Jember beserta mekanisme kerjanya didasarkan pada peraturan perundang – undangan. Berikut beberapa peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar hukum

- a. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950);



- b. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- c. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- d. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- h. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil);

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 18 seri E);

#### **4.1.10 Kedudukan, Tugas dan Fungsi :**

Kedudukan, Tugas pokok, dan Fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jember dapat di diskripsikan sebagai berikut :

- a) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- b) Dinas dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- c) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan.
- d) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  1. perumusan kebijakan daerah di bidang kelautan dan perikanan;
  2. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelautan dan perikanan;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang kelautan dan perikanan;
  4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kelautan dan perikanan; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **4.1.11 Uraian Tugas dan Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pembinaan umum dibidang peternakan, perikanan dan kelautan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- b. Melaksanakan semua kegiatan di wilayah laut Kabupaten, termasuk penataan dan pengelolaan perairan, eksplorasi, konversi, serta pengawasan pemanfaatan sumberdaya laut
- c. Melaksanakan penyuluhan bidang peternakan dan perikanan
- d. Menyelenggarakan penelitian peternakan dan perikanan spesifik daerah sesuai dengan kondisi lingkungan khusus
- e. Melaksanakan pengkajian teknologi dalam rangka penetapan teknologi anjuran
- f. Melaksanakan bimbingan teknis dan pelayanan kesehatan bidang peternakan dan perikanan
- g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang di berikan oleh bupati

**Berikut urutan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan :**

#### **4.1.12 Kepala Dinas**

Merupakan orang yang mempunyai kedudukan tertinggi dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat daerah :

#### **4.1.13 Sekretariat :**

Mempunyai tugas sebagai berikut :

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan pembinaan organisasi tatalaksana;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;

- d. pengelolaan urusan rumah tangga dinas, perlengkapan surat menyurat dan kearsipan;
- e. pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan perikanan; dan
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### **4.1.14 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :**

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan ketatausahaan penerimaan dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas dan kearsipan dinas;
- b. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- d. mempersiapkan seluruh rencana dan tata usaha kepegawaian;
- e. menyusun rencana program kegiatan anggaran dan laporan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi :

- a. pelaksanaan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan Dinas, tata naskah dinas dan kearsipan serta urusan rumah tangga dan protokol;
- b. pengurusan perbaikan kantor bangunan lain yang menjadi tanggungjawab Dinas;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan;
- d. pengurusan kendaraan dan alat angkutan lain yang menjadi tanggungjawab Dinas;
- e. pelaksanaan persiapan upacara, pertemuan dan rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu;
- f. penyelenggaraan tata usaha kepegawaian;
- h. pelaksanaan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
- i. penyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan;

- j. pelaksanaan tata usaha barang perlengkapan dan perbekalan;
- k. pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan serta memelihara barang perlengkapan dan perbekalan;
- l. penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan;
- m. penyiapan barang untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasai oleh dinas;
- n. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kegiatan kelautan dan perikanan;
- o. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana program kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan; dan
- q. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### **4.1.15 Sub Bagian Keuangan, perencanaan dan pelaporan :**

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- b. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi meliputi :

- a. penghimpunan dan pengolahan bahan untuk penyusunan anggaran;
- c. penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- d. pengolahan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- e. perhitungan anggaran dan verifikasi;
- f. penatausahaan pembayaran gaji pegawai;

- g. pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan bidang keuangan; dan
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### **4.1.16 Bagian Perikanan Tangkap :**

Mempunyai Tugas Sebagai Berikut :

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan melaporkan peningkatan dan pengembangan perikanan tangkap, pengolahan, pemasaran hasil perikanan tangkap serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi meliputi:

- a. penyusunan rencana pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tangkap;
- b. penyiapan bahan kebijakan prasarana dan sarana perikanan tangkap;
- c. penyiapan kebijakan penyebaran informasi teknologi dan penyediaan sarana perikanan tangkap;
- d. penyusunan kebijakan fasilitasi kelompok nelayan;
- e. pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan perikanan tangkap;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### **4.1.17 Seksi Produksi Perikanan Tangkap :**

Mempunyai Tugas Sebagai berikut :

Seksi Produksi Perikanan Tangkap mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan peningkatan, mengembangkan produksi sarana perikanan tangkap serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Produksi Perikanan Tangkap, mempunyai fungsi meliputi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis produksi dan sarana penangkapan meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi potensi produksi dan sarana penangkapan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan produksi dan sarana penangkapan;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan rencana peningkatan pengembangan produksi dan sarana penangkapan;
- d. pengumpulan data statistik perikanan tangkap;
- e. pelaksanaan penyebaran informasi teknologi produksi dan penyediaan sarana penangkapan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan
- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### **4.1.18 Seksi Kenelayanan dan Prasarana**

Mempunyai Tugas sebagai berikut :

Seksi Kenelayanan dan Prasarana mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan peningkatan, pengembangan kenelayanan, prasarana serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kenelayanan dan Prasarana mempunyai fungsi meliputi :

- a. pelaksanaan pengaturan dan pembinaan kegiatan nelayan, serta pembangunan prasarana perikanan tangkap;
- b. penumbuh kembangan Kelompok Usaha Bersama Nelayan;
- c. pelaksanaan usaha perlindungan nelayan;
- d. pelaksanaan dan pengkoordinasian usaha pengembangan desa pesisir; dan
- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### **4.1.19 Seksi pengolahan dan Pemasaran Hasil Ikan Tangkap**

Mempunyai Tugas sebagai berikut :

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tangkap mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan peningkatan, pengembangan kenelayanan, prasarana serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tangkap mempunyai fungsi meliputi

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tangkap;
- b. pelaksanaan kebijakan peningkatan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tangkap;
- c. penumbuh kembangan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran (Poklahsar) hasil perikanan tangkap;
- d. pelaksanaan penyebaran teknologi penanganan mutu hasil perikanan tangkap;
- e. pemberian pelayanan ijin usaha perikanan tangkap;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan
- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### **4.1.20 Bidang Perikanan Budidaya**

Mempunyai tugas sebagai berikut :

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan pengembangan perikanan budidaya serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi meliputi:

- a. pengembangan perikanan budidaya;
- b. pengembangan dan fasilitasi prasarana dan usaha perikanan budidaya;
- c. pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- d. pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan;
- e. pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan di bidang perikanan budidaya;
- f. penyusunan kebijakan fasilitasi pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan dan kelompok masyarakat pengawas;
- g. penyiapan bahan penyebaran teknologi perikanan budidaya; dan
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;

#### **4.1.21 Seksi Produksi Budidaya Ikan**

Mempunyai Tugas sebagai berikut :

Seksi Produksi Budidaya Ikan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan produksi pembudidayaan ikan serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Produksi Budidaya Ikan mempunyai fungsi meliputi :

- a. penyiapan bahan kebijakan penyebarluasan teknologi produksi budidaya;
- b. penyiapan data dan informasi statistik perikanan budidaya;
- c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB);
- d. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- e. penyiapan ketersediaan induk dan benih unggul; dan
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;

#### **4.1.22 Seksi Bina Usaha dan Sumber Daya manusia (SDM)**

Mempunyai Tugas sebagai berikut :

Seksi Bina Usaha dan SDM mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan bina usaha dan SDM serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bina Usaha dan SDM mempunyai fungsi meliputi :

- a. penyiapan bahan kebijakan peningkatan pengembangan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan budidaya;
- b. pelaksanaan kebijakan penanganan pasca panen perikanan budidaya;
- c. pelaksanaan penyebaran teknologi produksi pengolahan hasil perikanan budidaya;
1. d. penumbuh kembangan kelompok pembudidaya ikan dan kelompok pengolahan pemasaran;
- d. pemberian pelayanan ijin usaha perikanan budidaya; dan
- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### **4.1.23 Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan**

Mempunyai Tugas sebagai berikut :

Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan melaporkan peningkatan, pengembangan, pengelolaan sumberdaya ikan dan kesehatan lingkungan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan mempunyai fungsi meliputi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan dan kesehatan lingkungan;
- b. pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan sumberdaya ikan serta dampak yang ditimbulkannya;

- c. penumbuhkembangan Kelompok Masyarakat Pengawas inventarisasi data kerusakan fisik dan nilai kerugian sebagai akibat pencemaran dan kerusakan sumberdaya perikanan; dan
- d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

#### **4.1.24 Kelompok Jabatan Fungsional**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dengan keahlian dan kebutuhan.

Ketentuan mengenai kelompok jabatan fungsional sebagai berikut :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. b.Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- c. c.Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan

#### **4.1.25 Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)**

Unit Pelaksanaan Teknis adalah unsure penunjang sebagai tugas Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.

Ketentuan mengenai Unit Pelaksanaan Teknis adalah sebagai berikut :

- a. UPT mempunyai tugas membantu pelaksanaan sebagian tugas dinas .
- b. UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .
- c. UPT dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.
- d. Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

- e. Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **4.1.26 Tata Kerja**

Pola hubungan antara unit dalam Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan di atur sebagai berikut :

- a. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing.
- b. Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing - masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan.
- c. Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- d. Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing – masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- e. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- f. Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### **4.1.27 Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan**

Mekanisme pengisian atau pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jember di atur sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- b. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan

#### **4.2. Sejarah Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**

Sebelum terbentuknya tempat pelelangan ikan, harga ikan cenderung tidak stabil dan banyak pihak yang memberlakukan harga semaunya. Dapat dikatakan bahwa sebelum adanya TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya, masyarakat nelayan di Puger menganut hukum rimba. Hal ini dapat terlihat dari adanya kewenangan dari pihak yang kuat untuk menentukan harga sesuka hatinya sehingga seringkali menimbulkan ketidak stabilan harga dan tidak jarang pula kerugian bagi nelayan kecil. Berasas pada hal tersebutlah kemudian pemerintah mencanangkan program pendirian TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang diharapkan dapat meminimalisir adanya kecurangan harga, ketidak stabilan harga, dan perdagangan ilegal. Tugas TPI ini adalah sebagai sarana dan wadah bagi nelayan dalam menentukan harga yang pantas bagi kedua belah pihak baik itu penjual (nelayan) dan pembeli melalui kegiatan pelelangan. Jika ikan tersebut tidak dilelang maka keberadaan ikan tersebut akan dipasok atau ambil oleh para pengambek. Istilah pengambek atau pemodal itu sendiri yaitu para juragan-juragan yang mempunyai uang banyak untuk memberikan pinjaman kepada para nelayan tapi harga ikan ditentukan oleh orang yang punya uang (pengambek). Misalnya satu potong ikan (5 kg) harga umumnya Rp. 30.000 tapi si pengambek tersebut mengatakan harganya hari ini Rp. 28.000 sehingga uang Rp.2.000 tersebut masuk pada pihak pengambek (proses tersebut

sebenarnya merugikan pihak nelayan) disamping itu dia (si pengambek) ada perjanjian perpotong (bajong) dikenakan pajak Rp. 1.000 Dengan adanya harga ikan yang tidak benar (tidak jelas harga sebenarnya) maka pemerintah membentuk sebuah organisasi yang mengatur tentang jual beli ikan yang di sebut dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Pada tahun 1950-an sebelum terbentuknya tempat pelelangan ikan sebelumnya terdapat suatu yayasan yang mengatur usaha pelelangan ikan. Yayasan tersebut bernama Jajasan Perikanan Laut Puger (JPLP). Usaha-usaha yang dilakukan oleh JPLP adalah Tempat Pelelangan Ikan (TPI), penyediaan bahan dan alat tangkap perikanan (BAP), penjemuran ikan. Namun sampai sejauh itu belum banyak memberikan manfaat kepada nelayan anggota untuk menaikkan taraf ekonominya. Hal ini disebabkan oleh praktek system ijon oleh para tengkulak, dengan memberikan pinjaman dan bantuan yang sifatnya mengikat, sehingga relative harga ikan di pasaran dikuasai oleh mereka. Saat itu yang menjadi prakarsa pendirian yayasan ini adalah bapak Sumartojo sekaligus sebagai ketua, Muchrijal dari desa Puger Wetan, Imam Djoeremi dari desa Puger Kulon, serta beberapa warga yang lain dengan tujuan untuk mengkoordinir penjualan hasil tangkapan nelayan pantai Puger dan untuk mengantisipasi nelayan pendatang yang mulai berdatangan ke daerah Puger. Pada tahun 1964 nama lembaga ini diganti menjadi Koperasi Perikanan Laut Mijoso - Mino, alasannya yang dipakai untuk menampung seluruh aktifitas ekonomi yang ada di lokasi tersebut yang meliputi satu kecamatan dan bidang usaha tidak terbatas sektor perikanan saja tetapi pertanian dan peternakan. Berhubung tidak dapat berjalan dengan seimbang pada tahun 1972 berubah menjadi Yayasan Pelelangan Ikan (YPI) yang dengan tugas utama menangani TP saja. Perubahan kebijakan pemerintah untuk menertibkan badan usaha bersama pada tahun 1976 berganti nama lagi menjadi Badan Usaha Unit Desa (BUUD) dengan orientasi lebih fokus pada aspek perikanan yaitu menangani pelelangan ikan nelayan, anggotanya dengan berkedudukan di kantor Tempat Pelelangan Ikan Puger. Atas persetujuan dewan dan rapat anggota, pada tahun 1979 berganti menjadi Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Raharja dengan lebih memfokuskan usahanya pada sektor penangkapan ikan dan aspek lain yang berhubungan, sebagai ketua pertama Bapak Bapak Mudjamil

Al-Jihat (mantan KUA) dengan dibantu Bapak Sugianto dan H. Zaeni sebagai ketua dan Sekretaris. Dua tahun kemudian dilegalkan dengan Badan Hukum No. 4863/BH/1981 tanggal 16 April 1981.

Peranan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) itu sendiri adalah melelangkan ikan-ikan yang di peroleh dari para nelayan untuk membantu memperjualkan ikan yang didapatkan sehingga mendapatkan harga jual yang bisa diterima oleh para masyarakat (konsumen) dengan melihat kemampuan daya belinya. Peranan Tempat Pelelangan Ikan tersebut tidak berjalan secara optimal karena sangat sulit untuk mengatur para nelayan yang mayoritas telah terikat kontrak dengan para pengambek yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Hal tersebut sampai sekarang masih berlaku karena pemerintah tidak mempunyai upaya untuk mengkoordinir kelompok-kelompok nelayan supaya dimodali agar tidak bergantung pada pengambek.

Jam operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ditetapkan bukan dengan peraturan jam dinas melainkan jam ikan artinya jika ikan datang barulah dilakukan transaksi (mengkondisionalkan datangnya ikan). Misalnya ikan yang didapatkan oleh para nelayan jam 04.00 pagi maka pada saat itulah terjadi transaksi jual beli ikan, jika transaksi tersebut mengikuti jam dinas maka para pelaku-pelaku dalam proses penjualan tersebut tidak akan berjalan dan tidak akan mendapatkan hasil seperti halnya ikan datang pada malam hari dan melakukan transaksi menunggu jam dinas maka akibatnya tidak akan mendapatkan penghasilan.

### **4.3 Temuan Data**

Berdasarkan data yang diperoleh pada saat melakukan wawancara langsung dengan setiap Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Para informan yang menjadikan sumber informasi dalam penelitian akan di paparkan oleh penelitian dalam penjelasan sebagai berikut :

#### **4.3.1 Program : Pengembangan Perikanan Tangkap**

Pengembangan Perikanan Tangkap ialah suatu program yang di buat dan dilaksanakan oleh dinas peternakan kelautan dan perikanan kabupaten jember. Yang mana sudah berlangsung dari tahun 2012 sampai sekarang, adapun maksud dan tujuan dari adanya program tersebut untuk membantu nelayan pesisir dalam mempermudah untuk menangkap ikan dimana melaut menjadi mata pencarian utama bagi masyarakat pesisir pantai Khususnya kecamatan puger. Adapun isi dari program pengembangan ikan tangkap menurut dari Drh. Setya Wahyu Anita selaku penyelenggara program lebih tepatnya sebagai pejabat pembuat komitmen yang menyatakan bahwa :

“ gini dek. Untuk sebelumnya adek sudah dapat penjelasan kan dari bapak andi bahwa sanya program ini hanya terbatas kepada bantuan sarana dan prasarana saja. Untuk tujuan pengembangan dan dibentuknya program ini kami selaku penyelenggara hanya memberikan bantuan alat kelengkapan saja seperti semisal perahu, mesin, bahan bakar dsb dan hal ini semata – mata dilakukan untuk menunjang kebutuhan para nelayan untuk melaut agar hasil tangkapan ikannya lebih cepat dan bagus apabila kebutuhan mereka sudah terpenuhi, dan tentunya para nelayan khususnya nelayan yang berada di Kabupaten Puger tidak perlu bersusah paya lagi dan berkecil hati karena saat melaut untuk menelayan mereka masih perlu mengantri entah itu karena sewa menyewa perahu yang dilakukan oleh antar nelayan satu dengan nelayan lainnya habis dikarenakan biaya maupun waktu mereka sudah terbatas dan digantikan oleh para nelayan lainnya, karena kebanyakan para nelayan yang ada di Kabupaten Puger adalah nelayan yang masih belum punya perahu sendiri. Maka dari itu program ini serasa efektif dilaksanakan untuk menunjang kebutuhan para nelayan agar mereka dapat hidup sejahtera dan aman. Saya kira begitulah dek kira” (Wawancara, 15/06/2017)

Jadi menurut Drh. Setya Wahyu Anita program ini hanya terbatas kepada penyediaan sarana dan prasarana dalam menangkap ikan khususnya di kecamatan puger, dan ada beberapa berupa penjelasan demi menunjang pengembangn program tersebut agar berjalan dengan baik dan lancer, seperti halnya di ketahui



oleh peneliti bahwa kegiatan dalam program pengembangan ikan tangkap tersebut lebih terarah kepada peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap saja dan untuk DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) yang di kalkulasi setiap tahunnya sesuai dengan dana bantuan yang di berikan oleh pemerintah yakni sebesar Rp. 1.102.750.000 pertahun tidak kurang dan tidak lebih. Untuk biaya operasional sendiri itu tidak bisa di kalkulasi (tidak bisa di prediksi pertahunnya) untuk biaya operasional tahun ini sebesar Rp. 5.000.000

#### **4.3.2 Format Pemberian Hibah**

Sistem penerimaan hibah yang diberikan kepada para KUB Nelayan khususnya di Kec. Puger yang menjadi tempat peneliti untuk melakukan penelitian secara langsung, menurut informasi yang peneliti terima saat melakukan wawancara langsung dengan Bapak Imam selaku ketua organisasi KUB Kec. Puger menyatakan bahwa, untuk pemberian maupun penerimaan hibah yang diberikan kepada setiap Kelompok KUB yang ada di Kec. Puger sebelum diberlakukannya peraturan baru dari Kemendagri bahwasannya bagi setiap KUB sebelum menerima hibah dari pemerintah maupun dinas yang menangani hal tersebut, salah satu orang dinas mendatangi langsung KUB setempat dengan mencari tahu atau melakukan wawancara langsung kepada setiap KUB terkait dengan keluhan – keluhan apa sajakah yang selama ini dirasakan maupun yang kurang dari setiap KUB tersebut, setelah itu, pemerintah kemudian melakukan tindakan berupa pertimbangan apakah KUB tersebut benar- benar layak untuk menerima hibah tersebut, setelah diberikan keputusan baru bagi setiap KUB yang layak menerima hibah tersebut dapat mengambil atau menggunakan hibah yang telah diberikan oleh pemerintah setempat. Sementara untuk pemberian hibahnya itu sendiri adalah berupa sejumlah nominal atau uang untuk membeli perlengkapan para nelayan untuk melaut, dan untuk pengambilan hibah tersebut bagi setiap perwakilan KUB yang menerima hibah harus membawa atau mempunyai Akta Notaris yang nanti harus ditunjukkan kepada Dinas sebagai bukti untuk penerimaan hibah tersebut. hal ini diberlakukan atas perintah atau surat peraturan baru dari kemendagri yang berlaku dari tahun 2012- 2014, sedangkan untuk tahun 2015 sampai seterusnya, kecuali ada pembaruan peraturan terbaru

dari kemendagri para KUB yang dapat menerima hibah dari pemerintah saat ini harus mempunyai surat SKP (Surat Keterangan Penerima) surat ini wajib ditunjukkan kepada pemerintah atau dinas pada saat proses pengambilan hibah, adapun hibah yang diberikan atau dapat diterima saat ini oleh setiap KUB yang menerima hibah berupa alat kelengkapan untuk menangkap hasil laut, seperti alat tangkap, mesin, alat perbengkelan untuk memperbaiki kapal maupun perahu nelayan yang rusak, dan kelengkapan- kelengkapan lainnya yang dibutuhkan oleh para nelayan untuk melaut.

#### **4.3.3 Upaya Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam Kelengkapan Sarana dan Prasarana Terhadap KUB Kecamatan Puger**

Seperti yang diketahui bahwasannya Kecamatan Puger merupakan Kecamatan yang melimpah akan penghasilan ikannya. Kota Puger berjarak kira – kira 39 km arah Selatan Kota Jember. Kecamatan Puger memiliki beberapa wilayah pemerintah desa, dimana dua di antaranya adalah Desa Puger Wetan dan Desa Puger Kulon yang merupakan wilayah dengan potensi dominan perikanan laut. Nelayan adalah istilah bagi orang – orang yang sehari – harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainya yang hidup didasar laut, maupun Perairan Tawar, Perairan yang menjadi daerah aktivitas nelayan ini dapat merupakan perairan tawar, payau maupun laut. Kampung nelayan yang berada dikawasan tepi sungai Bedadung, sedangkan Kampung Nelayan yang berada di Desa Puger Kulon berada dikawasan tepi Sungai Besini. Kedua kampung nelayan tersebut dibatasi oleh kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Puger yang terletak di tepi muara kedua sungai yang menuju Samudra Indonesia. Pantai Puger mempunyai nilai yang sangat strategis untuk mengali potensi perikanan laut, pemberdayaan nelayan, dan pengembangan wilayah. Potensi lestari perikanan laut yang ada di perkirakan sebesar 14.691.5 ton per-tahun, terdiri dari jenis ikan tongkol, tuna cakalang, tengiri, cucut, cumi – cumi, dan berbagai macam udang. Produksi ikan sampai saat ini diperkirakan sebesar 5.936.4 ton pertahun atau baru 14,8% dari potensi lestari. Musim Ikan di Pantai Puger pada Prinsipnya dibagi menjadi tiga yaitu puncak musim, musim biasa, dan musim sepi, Permulaan musim biasanya pada bulan Juli sampai dengan Agustus dan sebagai puncak Musim pada bulan

September dan Oktober. Pada bulan Februari sampai dengan Juni/Julai merupakan musim biasa kerana jumlah ikan yang didapati relatif kecil. Pemasaran Ikan di Puger dibahagikan menjadi dua jenis iaitu :

1. Ikan Segar, diatur melalui pelelangan di PPI dengan daerah pemasaran ikan segar dari Puger ini biasanya adalah Jember, Lumajang, Surabaya dan Bali
2. Ikan Olahan, berupa ikan asin, ikan kering, dan ikan pindang dari Puger biasanya hanya dipasarkan ke wilayah Jember dan sekitarnya

Pantai Puger yang berada di wilayah Kecamatan Puger (berjarak kira – kira 39 km arah selatan kota Jember) merupakan salah satu kawasan yang selama ini dikenali sebagai lokasi pendaratan ikan yang cukup besar di Kabupaten Jember. Kecamatan Puger dengan jumlah penduduk 13.187 orang dan jumlah perahu sebanyak 1990 buah. Secara administratif, wilayah Kecamatan Puger yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan, pengolah ikan, dan pedagang ikan adalah wilayah Desa Puger Wetan (4.975 jiwa) dan Desa Puger Kulon (6.055 jiwa). Kawasan perikanan Puger merupakan salah satu kawasan perikanan yang diarahkan untuk dikembangkan sebagai kawasan minapolitan perikanan tangkap di Provinsi Jawa Timur, Namun hingga saat ini masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan perkembangan kawasan minapolitan belum optimal. Minapolitan adalah kawasan yang dibangun dan diitik beratkan pada kemajuan sektor perikanan dengan mengedepankan prinsip efisiensi, kualitas, percepatan dan berkesinambungan.

Tujuan pembangunan kawasan minapolitan sendiri adalah untuk :

1. Menumbuhkan serta meningkatkan kemandirian ekonomi kecil dan skala mikro
2. Menambahkan kualitas ekonomi menengah ke atas untuk memiliki daya saing yang tinggi dalam pasar global
3. Menjadikan sektor ekonomi kelautan dan perikanan sebagai penggerak ekonomi regional

Kawasan minapolis dibangun berdasarkan beberapa criteria umum yang wajib dipenuhi antara lain :

1. Pemanfaatan lahan untuk pengembangan potensi perikanan harus menggunakan potensi yang sesuai dengan peningkatan produksi, serta wajib menjaga kelestarian dan mencegah adanya kerusakan lingkungan sekitarnya
2. Tidak boleh memanfaatkan kawasan / wilayah yang telah di tetapkan pemerintah sebagai kawasan yang di lindungi kelestariannya
3. Kegiatan perikanan yang dilakukan dalam kegiatan skala besar di harapkan mampu menyerap dan memberdayakan banyak tenaga kerja dari lingkungan sekitar

Ada juga criteria khusus yang juga harus di perhatikan dalam pembangunan kawasan minapolitan, beberapa diantaranya :

1. Mempunyai geliat aktifitas ekonomi yang mampu mengerakkan pertumbuhan perekonomian daerah.
2. Memiliki sector ekonomi unggulan yang akan mendukung pertumbuhan sector ekonomi lain dalam wilayahnya atau kawasn lain di sekitarnya.
3. Memiliki keterkaitan dengan daerah pengguna hasil produksi maupun daerah yang menjadi penghasil sarana pendukung produksi
4. Mempunyai kemampuan memelihara dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana demi berlangsungnya kegiatan dalam waktu panjang dan kelestaraan lingkungan.
5. Memiliki luas untuk budidaya sekitar 200 Ha.

Namun dari uraian cerita di atas pada saat peneliti melakukan penelitian secara langsung ke tempat yang menjadi pusat penelitian yaitu Tempat pelelangan ikan (TPI) sangat berbeda jauh dengan kenyataan sebenarnya bahwa sanya Tempat pelelangan ikan (TPI) sangat kumuh sekali dan untuk kelengkapan sarana dan prasarananya masih terbatas dan minim sekali sering kali para pengepul ikan ( seseorang yang membeli hasil tangkapan ikan dari nelayan ) kesulitan dalam melakukan proses pemindahan ikan dari trepong ( box ikan ) ke basket ( alat saringan air ) kemudian terakhir pengebokan( paxking ) sebelum di pasarkan ke

pasar – pasar tradisional. maka dari itu penelitian ini penting di teliti oleh peneliti untuk mengetahui peran pemerintah Kabupaten Jember khususnya Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam pengembangan Sarana dan Prasarana di TPI ( tempat pelelangan ikan ) di kecamatan puger.

#### 4.3.4 Bantuan Langsung di Periode tahun 2015 di Kecamatan Puger

Seperti yang peneliti ketahui pada saat melakukan penelitian secara langsung ketempat berlangsungnya tempat pelelangan ikan (TPI) dari segi kelengkapan sarana dan prasarana sangat minim sekali, untuk itu pemerintah ( Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan ) mengembangkan program dengan memberikan bantuan secara langsung kepada kelompok usaha bersama (KUB) dimana KUB terbentuk pada tahun 2012 dengan jumlah KUB di tahun 2012 sebanyak 20 KUB di kecamatan puger dan dimana peningkatan KUB di tahun 2016 sebanyak 120 KUB dimana KUB terbentuk dengan adanya keinginan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Adapun bantuan dari Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan pada Periode Tahun 2015 dalam bentuk material maupun meteril dalam bentuk sebagai berikut :

**Tabel 4.3.4**  
**Daftar Kelompok Penerima bantuan di Kecamatan Puger tahun 2015**

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT KELOMPOK	BARANG YG DI TERIMA	DI TERIMA	NILAI (Rp)
1	KUB Ratu Ibu	Puger Wetan – Kec Puger	Jaring set net	20 piece	5.000.000
			Tool kit perbengkelan	1 Unit	1.500.000

			kapal		
2	KUB Barakuda	Puger Kulon – Kec Puger	Jaring set net	20 piece	5.000.000
			Tool kit perbengkelan kapal	1 Unit	1.500.000
3	KUB Bintang Laut	Puger Kulon – Kec Puger	Jaring set net	20 piece	5.000.000
			Tool kit perbengkelan kapal	1 Unit	1.500.000
4	KUB Putra Mandar	Puger Wetan – Kec PUGer	Jaring set net	20 piece	5.000.000
			Tool kit perbengkelan kapal	1 Unit	1.500.000
5	KUB Cahaya Indah	Puger Kulon – Kec Puger	Jaring set net	20 piece	5.000.000
			Tool kit perbengkelan kapal	1 Unit	1.500.000
6	KUB Pahala Samudra	Puger Kulon – Kec Puger	Jaring set net	20 piece	5.000.000
			Tool kit perbengkelan kapal	1 Unit	1.500.000
7	KUB Manunggal	Puger Wetan - Kec Puger	Jaring set net	20 piece	5.000.000
			Tool kit perbengkelan	1 Unit	1.500.000

			kapal		
8	KUB Gading Emas	Puger Kulon – Kec Puger	Jaring set net	20 piece	5.000.000
			Tool kit perbengkelan kapal	1 Unit	1.500.000
9	KUB Karunia	Puger Kulon – Kec Puger	Jaring set net	20 piece	5.000.000
			Tool kit perbengkelan kapal	1 Unit	1.500.000
10	KUB Mina Sari	Puger Wetan – Kec Puger	Jaring set net	20 piece	5.000.000
			Tool kit perbengkelan kapal	1 Unit	1.500.000
11	KUB Gading Emas	PugerKulon – Kec Puger	Jaring set net	20 piece	5.000.000
			Tool kit perbengkelan kapal	1 Unit	1.500.000
12	KUB Al Amin	Puger Wetan – Kec Puger	Jaring set net	20 piece	5.000.000
			Tool kit perbengkelan kapal	1 Unit	1.500.000
13	KUB Baru Jaya	Puger Wetan – Kec Puger	Jaring set net	20 piece	5.000.000
			Tool kit perbengkelan kapal	1 Unit	1.500.000
14	KUB Armada	Puger Kulon –	Jaring set net	20 piece	5.000.000

	Laut	Kec Puger	Tool kit perbengkelan kapal	1 Unit	1.500.000
15	KUB Jaya Negara	Puger Wetan – Kec Puger	Jaring set net	20 piece	5.000.000
			Tool kit perbengkelan kapal	1 Unit	1.500.000
16	KUB Bima Sakti	Puger Wetan – Kec Puger	Jaring set net	20 piece	5.000.000
			Tool kit perbengkelan kapal	1 Unit	1.500.000
17	KUB Mila	Puger wetan – Kec puger	Mesin Tempel 10 PK	1 Unit	10.000.000
18	KUB Laut Biru`	Puger Wetan – Kec Puger	Mesin Tempel 10 PK	1 Unit	10.000.000
19	KUB Tanjung Indah	Puger Kulon – Kec Puger	Mesin Tempel 10 PK	1 Unit	10.000.000
20	KUB Sinar Bahari	Puger Kulon – Kec Puger	Mesin Tempel 10 PK	1 Unit	10.000.000
21	KUB Sumber Laut	Puger Kulon – Kec Puger	Mesin Tempel 10 PK	1 Unit	10.000.000
22	KUB Cinta Kasih	Pugerv Wetan – Kec Puger	Cool Box Fiber	6 Unit	27.000.000
			Mesin Tempel 30PK	1 Unit	40.000.000
23	KUB Bintang Jaya	Puger Kulon – Kec Puger	Cool Box Fiber	6 Unit	27.000.000
			Mesin Tempel	1 Unit	40.000.000



			30PK		
24	KUB Matahari	Puger Wetan – Kec Puger	Cool Box Fiber	6 Unit	27.000.000
			Mesin Tempel 30PK	1 Unit	40.000.000
25	KUB Al Ali	Puger Kulon – Kec Puger	Cool Box Fiber	6 Unit	27.000.000
			Mesin Tempel 30PK	1 Unit	40.000.000
26	KUB Sampoerna	Puger Kulon – Kec Puger	Cool Box Fiber	6 Unit	27.000.000
			Mesin Tempel 30PK	1 Unit	40.000.000
27	KUB Surya Bahari	Puger Kulon – kec puger	Jaring set net	20 piece	5.000.000
			Tool kit perbengkelan kapal	1 Unit	1.500.000

Sumber Data : Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jember tahun 2015

Dari uraian tabel di atas akan di paparkan atau di jelaskan fungsi dan kegunaannya, sebagai berikut :

1. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Ratu Ibu

- a. Jaring Set Net merupakan alat tangkap ikan jenis perangkap yang ramah lingkungan, di pasangkan secara terus menerus menerus siang dan malam, bersifat pasif dan menghadang lari ikan

- b. Tool Kit Perbengkelan Kapal merupakan alat bantu untuk memperbaiki kerusakan di dalam kapal ketika sedang berlayar maupun di tepi pantai
2. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bara Kuda
  - a. Jaring Set Net merupakan alat tangkap ikan jenis perangkap yang ramah lingkungan, di pasangkan secara terus menerus menerus siang dan malam, bersifat pasif dan menghadang lari ikan
  - b. Toll Kit Perbengkelan Kapal merupakan alat bantu untuk memperbaiki kerusakan di dalam kapal ketika sedang berlayar maupun di tepi pantai
3. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bintang Laut
  - a. Jaring Set Net merupakan alat tangkap ikan jenis perangkap yang ramah lingkungan, di pasangkan secara terus menerus menerus siang dan malam, bersifat pasif dan menghadang lari ikan
  - b. Toll Kit Perbengkelan Kapal merupakan alat bantu untuk memperbaiki kerusakan di dalam kapal ketika sedang berlayar maupun di tepi pantai
4. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Putra Mandar
  - a. Jaring Set Net merupakan alat tangkap ikan jenis perangkap yang ramah lingkungan, di pasangkan secara terus menerus menerus siang dan malam, bersifat pasif dan menghadang lari ikan
  - b. Toll Kit Perbengkelan Kapal merupakan alat bantu untuk memperbaiki kerusakan di dalam kapal ketika sedang berlayar maupun di tepi pantai
5. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Cahaya Indah
  - a. Jaring Set Net merupakan alat tangkap ikan jenis perangkap yang ramah lingkungan, di pasangkan secara terus menerus menerus siang dan malam, bersifat pasif dan menghadang lari ikan
  - b. Toll Kit Perbengkelan Kapal merupakan alat bantu untuk memperbaiki kerusakan di dalam kapal ketika sedang berlayar maupun di tepi pantai
6. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Pahala Samudra

- a. Jaring Set Net merupakan alat tangkap ikan jenis perangkap yang ramah lingkungan, di pasangkan secara terus menerus menerus siang dan malam, bersifat pasif dan menghadang lari ikan
  - b. Toll Kit Perbengkelan Kapal merupakan alat bantu untuk memperbaiki kerusakan di dalam kapal ketika sedang berlayar maupun di tepi pantai
7. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Manunggal
- a. Jaring Set Net merupakan alat tangkap ikan jenis perangkap yang ramah lingkungan, di pasangkan secara terus menerus menerus siang dan malam, bersifat pasif dan menghadang lari ikan
  - b. Toll Kit Perbengkelan Kapal merupakan alat bantu untuk memperbaiki kerusakan di dalam kapal ketika sedang berlayar maupun di tepi pantai
8. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Gading Emas
- a. Jaring set Net merupakan alat tangkap ikan jenis perangkap yang ramah lingkungan, di pasangkan secara terus menerus menerus siang dan malam, bersifat pasif dan menghadang lari ikan
  - b. Toll Kit Perbengkelan Kapal merupakan alat bantu untuk memperbaiki kerusakan di dalam kapal ketika sedang berlayar maupun di tepi pantai
9. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Karunia
- a. Jaring Set Net merupakan alat tangkap ikan jenis perangkap yang ramah lingkungan, di pasangkan secara terus menerus menerus siang dan malam, bersifat pasif dan menghadang lari ikan
  - b. Toll Kit Perbengkelan Kapal merupakan alat bantu untuk memperbaiki kerusakan di dalam kapal ketika sedang berlayar maupun di tepi pantai
10. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mina Sari
- a. Jaring Set Net merupakan alat tangkap ikan jenis perangkap yang ramah lingkungan, di pasangkan secara terus menerus menerus siang dan malam, bersifat pasif dan menghadang lari ikan

- b. Toll Kit Perbengkelan Kapal merupakan alat bantu untuk memperbaiki kerusakan di dalam kapal ketika sedang berlayar maupun di tepi pantai

11. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Gading Emas

- a. Jarring Set Net merupakan alat tangkap ikan jenis perangkap yang ramah lingkungan, di pasangkan secara terus menerus menerus siang dan malam, bersifat pasif dan menghadang lari ikan
- b. Toll Kit Perbengkelan Kapal merupakan alat bantu untuk memperbaiki kerusakan di dalam kapal ketika sedang berlayar maupun di tepi pantai

12. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Al – Amin

- a. Jarring Set Net merupakan alat tangkap ikan jenis perangkap yang ramah lingkungan, di pasangkan secara terus menerus menerus siang dan malam, bersifat pasif dan menghadang lari ikan
- b. Toll Kit Perbengkelan Kapal merupakan alat bantu untuk memperbaiki kerusakan di dalam kapal ketika sedang berlayar maupun di tepi pantai

13. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Baru Jaya

- a. Jaring Set Net merupakan alat tangkap ikan jenis perangkap yang ramah lingkungan, di pasangkan secara terus menerus menerus siang dan malam, bersifat pasif dan menghadang lari ikan
- b. Toll Kit Perbengkelan Kapal merupakan alat bantu untuk memperbaiki kerusakan di dalam kapal ketika sedang berlayar maupun di tepi pantai

14. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Armada Laut

- a. Jaring Set Net merupakan alat tangkap ikan jenis perangkap yang ramah lingkungan, di pasangkan secara terus menerus menerus siang dan malam, bersifat pasif dan menghadang lari ikan
- b. Toll Kit Perbengkelan Kapal merupakan alat bantu untuk memperbaiki kerusakan di dalam kapal ketika sedang berlayar maupun di tepi pantai

15. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Jaya Negara

- a. Jaring Set Net merupakan alat tangkap ikan jenis perangkap yang ramah lingkungan, di pasangkan secara terus menerus menerus siang dan malam, bersifat pasif dan menghadang lari ikan
- b. Toll Kit Perbengkelan Kapal merupakan alat bantu untuk memperbaiki kerusakan di dalam kapal ketika sedang berlayar maupun di tepi pantai

16. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bima Sakti

- a. Jaring Set Net merupakan alat tangkap ikan jenis perangkap yang ramah lingkungan, di pasangkan secara terus menerus menerus siang dan malam, bersifat pasif dan menghadang lari ikan
- b. Toll Kit Perbengkelan Kapal merupakan alat bantu untuk memperbaiki kerusakan di dalam kapal ketika sedang berlayar maupun di tepi pantai

17. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mila

- a. Mesin Tempel 10Pk berfungsi sebagai alat untuk menjalankan perahu kecil yang biasa disebut sebai sekoci

18. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Laut Biru

- a. Mesin Tempel 10Pk berfungsi sebagai alat untuk menjalankan perahu kecil yang biasa disebut sebai sekoci

19. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Tanjung Indah

- a. Mesin Tempel 10Pk berfungsi sebagai alat untuk menjalankan perahu kecil yang biasa disebut sebai sekoci

20. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sinar Bahari

- a. Mesin Tempel 10Pk berfungsi sebagai alat untuk menjalankan perahu kecil yang biasa disebut sebai sekoci

21. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sumber Laut

- a. Mesin Tempel 10Pk berfungsi sebagai alat untuk menjalankan perahu kecil yang biasa disebut sebai sekoci

22. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Cinta Kasih

- a. Col Box Fiber alat yang di pergunkan untuk menyimpan ikan agar selalu segar dan suhunya tetap terjaga

- b. Mesin Tempel 30Pk berfungsi sebagai alat untuk menjalankan perahu kecil yang berkekuatan lebih besar biasa digunakan di perahu yang berbahan viber

23. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bintang Jaya

- a. Col Box Fiber Fiber alat yang di pergunakan untuk menyimpan ikan agar selalu segar dan suhunya tetap terjaga
- b. Mesin Tempel 30Pk berfungsi sebagai alat untuk menjalankan perahu kecil yang berkekuatan lebih besar biasa digunakan di perahu yang berbahan viber

24. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Matahari

- a. Col Box Fiber Fiber alat yang di pergunakan untuk menyimpan ikan agar selalu segar dan suhunya tetap terjaga
- b. Mesin Tempel 30Pk berfungsi sebagai alat untuk menjalankan perahu kecil yang berkekuatan lebih besar biasa digunakan di perahu yang berbahan viber

25. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Al – Ali

- a. Col Box Fiber Fiber alat yang di pergunakan untuk menyimpan ikan agar selalu segar dan suhunya tetap terjaga
- b. Mesin Tempel 30Pk berfungsi sebagai alat untuk menjalankan perahu kecil yang berkekuatan lebih besar biasa digunakan di perahu yang berbahan viber

26. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sampoerna

- a. Col Boc Fiber Fiber alat yang di pergunakan untuk menyimpan ikan agar selalu segar dan suhunya tetap terjaga
- b. Mesin Tempel 30Pk berfungsi sebagai alat untuk menjalankan perahu kecil yang berkekuatan lebih besar biasa digunakan di perahu yang berbahan viber

27. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Surya Bahari

- a. Jaring Set Net merupakan alat tangkap ikan jenis perangkap yang ramah lingkungan, di pasang secara terus menerus menerus siang dan malam, bersifat pasif dan menghadang lari ikan

- b. Tool Kit Perbengkelan Kapal merupakan alat bantu untuk memperbaiki kerusakan di dalam kapal ketika sedang berlayar maupun di tepi pantai

#### 4.3.5 Bantuan langsung Periode tahun 2016 di Kecamatan Puger

Pada tahun 2016 kecamatan Puger kembali mendapatkan bantuan langsung seperti pada tahun sebelumnya, namun pada tahun 2016 sangat jauh berdeda di dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2016 ini jumlah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah tepatnya Dinas Peternakan, Perikanan dan kelautan lebih sedikit akan tetapi sudah membantu memaksimalkan kinerja nelayan yang ada di Kecamatan Puger.

Adapun bantuan dari Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan pada Periode Tahun 2016 dalam bentuk material maupun meteril dalam bentuk sebagai berikut :

**Tabel 4.3.5**

#### **Daftar Kelompok Penerima bantuan di Kecamatan Puger**

NO	ALAT	KUB	ALAMAT	ALAT	JUMLAH	NILAI
1	Tool Kit Perbengkelan	Cipta Karya	Desa Puger Wetan Kec. Puger	Tool Kit Perbengkelan	10 Unit	20.000.000
3	Tool Kit Perbengkelan	Nusa Barong Jaya	Desa Puger Kulon Kec. Puger	Tool Kit Perbengkelan	10 Unit	20.000.000
4	Mesin 10 Pk	Sinar baru 2	Desa Mojomulyo Kec. Puger	Mesin 10 Pk	4 Unit	40.000.000
7	Pancing	Mina Sari	Desa Puger Wetan Kec. Puger	Pancing	25 Unit	62.500.000
8	Pancing	Putra Jaya	Desa Puger Wetan Kec. Puger	Pancing	25 Unit	62.500.000

Jumlah	205.000.000
--------	-------------

Sumber Data : Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jember tahun 2016

Dari uraian tabel di atas akan di paparkan atau di jelaskan fungsi dan kegunaannya, sebagai berikut :

1. Tool kit perbengkelan berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki kerusakan di dalam kapal di berikan kepada KUB Cipta Karya Desa Puger Wetan Kecamatan Puger sebanyak 10 unit yang dimana dana yang dihabiskan kurang lebih sekitar Rp. 20.000.000
2. Tool kit perbengkelan berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki kerusakan di dalam kapal di berikan kepada KUB Nusa Barong Jaya Desa Puger Kulon Kecamatan Puger sebanyak 10 unit yang dimana dana yang dihabiskan kurang lebih sekitar Rp. 20.000.000
3. Mesin 10 PK berfungsi sebagai alat untuk menjalankan perahu kecil yang disebut sebai sekoci yang di berikan kepada KUB Sinar Baru 2 Desa Mojomulyo Kecamatan Puger sebanyak 4 unit yang dimana dana yang dihabiskan kurang lebih sekitar Rp. 40.000.000
4. Pancing berfungsi sebagai alat tangkap ikan yang biasa di gunakan para nelayan di Desa puger, dimana bantuan pancing ini diberikan kepada KUB Putra jaya Desa Puger Wetan Kecamatan Puger sebanyak 25 unit dimana dana yang di habiskan kurang lebih sekitar Rp. 62.500.000
5. Pancing berfungsi sebagai alat tangkap ikan yang biasa di gunakan para nelayan di Desa puger, dimana bantuan pancing ini diberikan kepada KUB Putra Jaya Desa Puger Wetan Kecamatan Puger sebanyak 25 unit dimana dana yang di habiskan kurang lebih sekitar Rp. 62.500.000

Kelompok Usaha Bersama (KUB) merupakan suatu gabungan dari sekian banyak nelayan yang menjadi satu kelompok, dimana suatu kelompok terbentuk



dengan inisiatif para nelayan sendiri yang ada di Kecamatan Puger. Kemudian kelompok tersebut juga di dukung dan di resmikan oleh Forum nelayan, yang mana dari forum tersebut sering kali di rapatkan tentang keluhan – keluhan maupun saran dari nelayan.

Berikut beberapa Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang mendapatkan bantuan langsung yang berupa alat perlengkapan kapal dan alat tangkap dari Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan:

1. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Cipta Karya

Yang dimana kelompok ini di pimpin oleh Bapak Anton yang telah mendapatkan bantuan berupa Tool Kit Perbengkelan Kapal yang berfungsi untuk memperbaiki segala kerusakan yang ada di kapal – kapal kelompok nelayan tersebut.

2. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nusa Barong Jaya

Yang dimana kelompok ini di pimpin oleh Bapak Didik Suwandi yang telah mendapatkan bantuan berupa Tool Kit Perbengkelan yang berfungsi untuk memperbaiki segala kerusakan yang ada di kapal – kapal kelompok nelayan tersebut.

3. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sinar Baru 2

Yang dimana kelompok ini di pimpin oleh Bapak Abdurrahman yang telah mendapatkan bantuan berupa mesin tempel 10pk yang berfungsi sebagai alat untuk menjalankan perahu kojung (perahu kecil) yang bernilai Rp.10.000.000

4. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mina Sari

Yang dimana kelompok ini di pimpin oleh Bapak H. Sarifudin yang telah mendapatkan bantuan berupa alat pancing yang berfungsi untuk menangkap ikan di laut, yang bernilai Rp.2.480.000

5. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Putra Jaya

Yang dimana kelompok ini di pimpin oleh Bapak Asmak hasan R yang dimana kelompok ini telah mendapatkan bantuan berupa alat pancing yang berfungsi untuk menangkap ikan, yang bernilai Rp.2.480.000

Berdasarkan dari ke 5 Kelompok Usaha Bersama (KUB) peneliti hanya mengambil ke 3 Kelompok Usaha Bersama (KUB) untuk di jadikan informan, Yakni KUB Cipta karya, KUB Mina Sari dan KUB Sinar Baru 2. Berikut Uraian atau pemaparan yang saya ambil dari 3 ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Kecamatan Puger :

Berikut Berdasarkan hasil analisa dan wawancara peneliti kepada penerima bantuan langsung dari Dinas Peternakan, perikanan dan Kelautan, dari beberapa KUB menyatakan bahwa bantuan yang di terima oleh KUB Cipta Karya cukup bermanfaat,berikut petikan wawancara peneliti dengan bapak anton ( 33 tahun ) Berikut pernyataan dari bapak anton :

“Mun masala bantuen dari pemerenta jember dibik jieh bedeh cong, taon berik tain 2016, tapeh engkok korang polanah tang kelompok reah jumlahah bedeh 14 nelayan, sareng pamerenta engkok gun eberik 10 bigik kan korang 4 tapeh tk rapah lah, katembeng engkok tak eberik bantuen skaleh kan pas posing kok hahahaha(sambil ketawa). Engkok eberik bantuan Toll Kit Perbengkelan kapal 10 bigik dedih gik korang 4 cong, kan korang 4 yeh dedih 4 nelayan jieh emeleagin bik engkok agguy pessenah Kas KUB se ben minggunah nelayan majer ka bendahara, mun tokang matepak en mesen se rosak otabel se laen se rosak Alhamdulillah (sambil tersenyum) tang nelayan taoh kabbi keng mun bedeh se tak ngerteh erembuk bersama. Cokop lah cong cokop abentoh katembeng tak naremah sakaleh (sambil ngakak). (10/03/2017)”

Adapun pernyataan Bapak Anton tersebut akan saya jelaskan karena Bapak Anton menggunakan bahasa Madura yang biasa di gunakan sehari – hari :

Kalau masalah bantuan dari Pemerintrah Jember itu ada. Di tahun 2016 kemaren, akan tetapi kurang dari kebutuhan kami di karenakan jumlah Kelompok Nelayan di KUB Cipta Karya yang berjumlah 14 kelompok nelayan, sedangkan bantuan yang di berikan oleh Pemerintah Jember berjumlah 10 unit Toll Kit Perbengkelan Kapal, sedangkan 4 kelompok nelayan yang lain yang belum kebagian Toll Kit Perbengkelan kapal di ambilkan dana dari Uang Kas KUB yang setiap minggunya di setorkan kepada bendahara, semisal ada kerusakan pada kapal Nelayan tersebut, setiaap Kelompok Nelayan di KUB Cipta Karya sudah tau cara memperbaiki kerusakan yang ada. Namun jika mengalami kesulitan akan di

perbaiki bersama – sama. Adapun bantuan dari pemerintah sendiri cukup membantu bagi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Cipta Karya.

Selain pernyataan dari Bapak Anton ( KUB Cipta Karya ) ada pernyataan lain yang di paparkan oleh Bapak H. Syarifuddin ketua KUB Mina Sari pada tanggal yang sama, berikut pernyataan dari Bapak H. Syarifuddin :

“ iyeh bedeh, derih pemerinta Kabupaten Jember se eberik langsung ka stiap KUB se naremah bentoan derih pemerenta ekalak neng kantor bupati tapeh engkok naremah bantuan ajieh taon 2016 mun taon 2017 reah tadek gik tak naremah, engkok beriknah naremah bantuan dari pemerenta, engkok eberik bentoan pancing 25 unit padeh bik KUB Putra Jaya engkok abereng dari puger ka jember bereng bik KUB Putra Jaya (jelas bapak H. Sarifuddin ). Alhamdulillah cokop lah cong keng mander etahun 2017 reah bedeh pole yeh makle sajen semangat mun alakoh kok ( sambil ketawa ). 10/03/2017”

Dari pemaparan Bapak H. syarifuddin di atas yang jugak menggunakan bahasa Madura saya akan memaparkan isi tersebut

“iya ada, dari Pemerintah Kabupaten Jember di kasikan langsung ke setiap KUB yang nerima bantuan dari Pemerintah di ambil langsung di kantor Bupati, saya nerima bantuan itu di tahun 2016 kalau tahun 2017 belum nerima, bantuan dari Pemerintah yang saya terima berupa pancing 25 unit, sama seperti Kub Putra Jaya, saya berangkat bersama dari puger ke Jember bersama Kub Putra Jaya ( Jelas bapak H. Sarifudin ). Alahamdulillah sudah cukup akan tetapi semoga aja di tahun 2017 ini ada bantuan lagi dari pemerintah supaya saya kerja lebih semangat lagi ( sambil ketawa ).

Berikut pernyataan dari kedua informan yakni Bapak H. syarifuddin dan Bapak Abdurrahman menyatakan hal yang sama pada tanggal & hari yang sama, Berikut pernyataan Bapak Abdurrahman selagi Ketua Kelompok Sinar Baru 2:

“Bantuan deri pemerenta bedeh, tapeh tahun 2016 tahun 2017 gik tadek cumak engkok ngeding isu bekala bedeeh bantuan dari pemerinta etaon 2017 reah mun tak sala bulan 5 (sambil mengingat). Bantuan se eberik pemerinta reah mesin tempel 10pk tapeh gun eberik 4 biggik . cokop abento lah polanah mesinah nelayan e KUB sinar baru reah benyak se lah rosak”.

Dari pemaparan Bapak Abdurrahman bahwasanya sudah ada bantuan dari Pemerintah Kabupaten Jember di tahun 2016 namun di tahun 2017 belum ada, akan tetapi beliau mendengar isu bakal adanya bantuan dari pemerintah di tahun 2017 ini pada bulan mei 2017. Bantuan yang di berikan Pemerintah Kabupaten

jember tepatnya Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan berupa mesin tempel 10pk yang berjumlah 4unit. Bantuan yang di berikan Pemerintah dirasa sudah cukup, karena di KUB Sinar Baru ini memiliki kendala mesin yang sudah tidak layak di pakai

Dari Pemaparan 3 Kelompok Usaha Bersama (KUB) tersebut hampir sama pendapat mereka, di karenakan bantuan yang di berikan sudah mencukupi jumlah kebutuhan yang di butuhkan oleh para kelompok nelayan yang dimana bantuannya sangat membantu kegiatan nelayan yang ada di Kecamatan Puger akan tetapi ada juga yang belum merasa cukup puas dengan bantuan yang di terima. Namun ada harapan lain dari masyarakat terutama yang sudah menerima bantuan tersebut agar kedepannya Dinas Peternakan, Perikanan & Kelautan lebih baik dalam memberikan pelayanan bagaimana caranya memberikan pelayanan yang lebih baik lagi sehingga masyarakat tidak enggan menyampaikan keluhan keluhan mereka ataupun apa yang menjadi keinginan mereka bisa terwujud dengan Dinas Peternakan, Perikanan & kelautan, seperti yang telah di jelaskan di atas bahwasanya untuk kedepannya Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan memberikan pelayanan yang lebih baik.

Selain itu pemerintah jugak harus memperhatikan kebutuhan yang di butuhkan setiap kelompok nelayan, karena setiap kelompok nelayan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda oleh karena itu pemerintah harus lebih jeli dalam memberikan bantuan agar bantuan yang diberikan tepat pada sasaran yang dituju

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah Jember Terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan di Kecamatan Puger sebagai berikut :

1. Menghasilkan program yang dapat membantu perkembangan Kelengkapan Sarana dan Prasarana TPI Puger
2. Dapat di jadikan sebagai salah satu alternatif atau referensi dalam upaya peningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berada di Desa Puger Kecamatan Puger. Dapat di sadari sendiri bahwasanya penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan maka dari itu penulis sangat berterimakasih sekali terhadap keritikan maupun saran demi pengembangan lebih lanjut di kemudian hari

#### **5.2 Saran**

Untuk Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam pengembangan program yang di buat agar lebih baik lagi dan tepat guna atau tepat sasaran